UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi
Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)**
Patricia Abigail Simanjuntak, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* Kencana, Jakarta.

_____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Amari, Mohammad, 2013, *Politik Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi,* Solusi Publishing, Jakarta.

Amrani, Hanafi, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta.

Ashafa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.

Black, Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary, 4th Edition*, West Publishing Co., St. Paul.

Chazawi, Adami, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia,* Bayu Media Publishing, Malang.

_____, 2019, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Depok.

_____, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Depok.

Hamsir, 2020, *Hukum Pidana Khusus,* Sefa Bumi Persada, Alue Awe-Lhokseumawe.

Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008,* Rineka Cipta, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S., 2024, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Depok.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi
Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)**
Patricia Abigail Simanjuntak, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Huntington, Samuel P., 1968, *Political Order in Changing Societies,* Yale University Press, New Haven and London.

Lubis, Mochtar dan James C. Scott, 1988. *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Matravers, Matt, 2000, *Justice and Punishment: The Rationale of Coercion*, Oxford University Press, Oxford and New York.

Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung.

Nurdjana, IGM, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.

Prakoso, Djoko, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia,* Liberty, Yogyakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Alumni, Bandung.

_____, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi
Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)**
Patricia Abigail Simanjuntak, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

_____, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Tim SPORA, 2015, *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang.

B. Artikel Jurnal

Ahmad et al., "*Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*," Journal of Lex Generalis, Vol. 2, No. 1, Januari 2021.

Aisyah, Siti dan Atikah Rahmi, "*Analisis Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*," UNNES Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.

Alatas, M., "*Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi,*" Journal of Lex Philosophy, Vol. 5, No. 2, Desember 2024.

Alfatahan, M., et al., "*Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Objek Jaminan dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 70/PDT.BTH/2015/PN.BIT)*," Rewang Rencang, Vol. 6, No. 9, September 2025.

Aminudin, Muhammad et al., "*Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*," Penerangan Hukum, Vol. 12, No. 2, September 2024.

Aviano, Vially dan Lola Yustrisia, "*Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi*," El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 10, No. 2, Oktober 2024.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi
Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)**
Patricia Abigail Simanjuntak, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DM, Mohd. Yusuf, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat*," Jurnal Ilmu hukum, humaniora, dan politik, Vol. 5, No. 4, Maret 2025.

Doloksaribu, Esteben et al., "*Problematika Pidana Uang Pengganti dalam Mewujudkan Pemulihan Kerugian Negara pada Perkara Korups*i," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 3, Mei 2026.

Fridawati, Titit et al., "*Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana*," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1, No. 3, Oktober 2024.

Hakim, Sholihul, "*Kendala Pengembalian Aset Korupsi Melalui Lelang (Studi Kasus H. Lutman bin Rumadi di Magelang)*," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 2, Mei 2025.

Hutapea, Rinsan Maratur dan Hudi Yusuf, "*Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ditinjau Dari Aspek Kriminologi,*" Media Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 3, Juli 2025.

Indriana, Yayan, "*Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*," Jurnal Cepalo, Vol. 2, No. 2, Desember 2018.

Juliandari, Nike dan Rahmadani Yusran, "*Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Barang Sitaan pada Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Padang*," Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Vol. 6, No. 2, Agustus 2025.

Kurniawan, Rudy Cahya, "*Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*," Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 12, No. 3, Desember 2018.

Lantari, Suhara Cycilia, "*Kajian Hukum Tugas, Kewenangan Serta Tanggung Jawab Aparatur Negara Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Dalam Pemerantas Korupsi,*" Lex Administratum, Vol. 6, No. 1, Juli 2018.

M., Mohd. Yusuf Daeng et al., "*Peran Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Efektif*," Andrew Law Journal, Vol. 4, No. 2, Desember 2025.

Manihuruk, Rifkah et al., "*Pelacakan Aset Tindak Pidana Korupsi: Analisis Hambatan Yang Dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*," Hukum Dinamika Ekselensia, Vol. 06, No. 4, Desember 2024.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi
Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)**
Patricia Abigail Simanjuntak, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mahmud, Ade, "*Dinamika Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*," Jurnal Hukum Mimbar Justicia, Vol. 3, No. 2, Desember 2017.

Meliana, Yang, "*Mengurai Tantangan Uang Pengganti dalam Kasus Tipikor: Studi Yuridis dan Implikasinya pada Pemulihan Keuangan Negara*," Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 5, No. 11, November 2024.

Mulkan, Hasanal dan Serlika Aprita, "*Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*," The Juris, Vol. 7, No. 1, Juni 2023.

Pratama, Muhammad Gilang, "*Faktor Penghambat Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Praktik Penegakan Hukum*," Jurnal Media Akademik, Vol. 4, No. 1, Januari 2026.

Pratama, Nova Indra, "*Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)*," Airlangga Development Journal, Vol. 5, No. 2, Desember 2021.

Pratama, Yudi Anugrah, "*Strategi Optimalisasi Mutual Legal Assistance (MLA) Untuk Pemulihan Aset Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Transnasional*," Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 1, November 2025.

Podom, Prayogi Aryovandri et al., "*Peran Putusan Sela dan Putusan Akhir dalam Mewujudkan Keadilan Prosedural di Pengadilan Mahkamah*," Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, Juni 2025.

Putry, Bani Amella Maha, "*Kajian Pelaksanaan Lelang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Barang Sitaan*," KeadilaN, Vol. 23, No.1, Februari 2025.

Rajagukguk, Meryana A., dan M. Alirahman Djoyosugito, "*Analisis Hukum Terhadap Kinerja Kejaksaan dalam Menangani Kasus-Kasus Mega Korupsi di Indonesia,*" The Prosecutor Law Review, Vol. 3, No. 1, Agustus 2025.

S., Laurensius Arliman dan Maria Margareta Hutajulu, "*Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia,*" Ensiklopedia Of Journal, Vol. 8, No. 2, Januari 2026.

Salman, Tiara dan Arrie Budhiartie, "*Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia,*" Jurnal Nalar Keadilan, Vol. 4, No. 2, Desember 2024.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)
Patricia Abigail Simanjuntak, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Setiawan, Deni et al., "*Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia,*" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1, No. 3, Oktober 2024.

Siswanto, D., "*Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir,*" Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, No. 1, Januari 2013.

Syamza, Ridwan dan Iyah Faniyah, "*Efektivitas Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti oleh Jaksa Eksekutor Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*," Sakato Ekasakti Law Review, Vol. 4, No. 2, September 2025.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Harwiadi, R., 2017, *Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Magister Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet

Ali Ridho, "Optimalisasi Lelang Barang Milik Negara melalui SOP Integratif (Studi Kasus KPKNL Jakarta II)," https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12672/Optimalisasi-Lelang-Barang-Milik-Negara-melalui-SOP-Integratif-Studi-Kasus-KPKNL-Jakarta-II.html/1000, diakses pada 19 Juni 2026.

Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia, "MLA (Mutual Legal Assistance)," https://divhubinter.polri.go.id/kerja-sama-internasional/mla, diakses pada 25 Mei 2026.

Efraim Jordi Kastanya, "Perbedaan Peraturan dan Keputusan," https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-keputusan-dengan-peraturan-lt4f0281130c750/#, diakses pada 15 Mei 2026.

Kejaksaan Republik Indonesia, "Kejaksaan Bentuk Tim JAGO Guna Optimalisasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana di Luar Negeri," https://story.kejaksaan.go.id/inovasi/kejaksaan-bentuk-tim-jago-guna-optimalisasi-pemulihan-aset-hasil-tindak-pidana-di-luar-negeri-mvk.html?screen=7, diakses pada 25 Mei 2026.

Muhammad Raihan Nugraha, "Adakah Batas Waktu Penyelidikan dan Penyidikan?" https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-batas-

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)
Patricia Abigail Simanjuntak, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

waktu-penyelidikan-dan-penyidikan-lt687a1f2b57fe8/#_ftn9, diakses pada 25 Mei 2026.

_____, "Kemanakah Uang Pidana Denda Dibayarkan?", https://www.hukumonline.com/klinik/a/kemanakah-uang-pidana-denda-dibayarkan-lt63ecba18bf8ef/, diakses pada 15 November 2025.

Teguh Hari Prasetyo, "Korupsi: Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-sendi Kehidupan Bangsa dan Negara," https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html#:~:text=Tindakan%20korupsi%20yang%20merajalela%20mengakibatkan,vital%20dalam%20menjaga%20stabilitas%20negara, diakses pada 1 November 2025.

Penulis Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, "Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi," https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi, diakses pada 5 November 2025.

Penulis Hukumonline, "Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka dan Masalahnya," https://www.hukumonline.com/berita/a/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya-lt5733f0ea01aea/, diakses pada 25 Mei 2026.

_____, "Perlu Jaminan bagi Masyarakat untuk Ikut Memberantas Korupsi," https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-jaminan-bagi-masyarakat-untuk-ikut-memberantas-korupsi-hol3640/?page=1, diakses pada 26 Mei 2026.

_____, "PN Jaksel Bebaskan Saksi Pelapor Korupsi yang Menjadi Terdakwa," https://www.hukumonline.com/berita/a/pn-jaksel-bebaskan-saksi-pelapor-korupsi-yang-menjadi-terdakwa-hol3967/?page=2, diakses pada 26 Mei 2026.

_____, "Uang Pengganti (2): Eksekusi dan Masalah Tanggung Renteng," https://www.hukumonline.com/berita/a/uang-pengganti-2--eksekusi-dan-masalah-tanggung-renteng-hol14214/,diakses pada 10 Mei 2026.

Sunoto, "Krisis Beban Kerja Hakim Tipikor," https://dandapala.com/article/detail/krisis-beban-kerja-hakim-tipikor, diakses pada 25 Mei 2026.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)
Patricia Abigail Simanjuntak, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tim Hukumonline, "Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP Baru," https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/?page=1, diakses pada 15 November 2025.

Tim Redaksi, "Tentang Pidana Pokok dan Pidana Tambahan," https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/tentang-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan-lt6278913d86166/, diakses pada 15 November 2025.

Transparency International Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi 2025: Penurunan Kebebasan Sipil & Akses Pada Keadilan Mengancam Perjuangan Melawan Korupsi," https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2025-penurunan-kebebasan-sipil-akses-pada-keadilan-mengancam-perjuangan-melawan-korupsi/, diakses pada 1 Juni 2026.

Zenny Rezania Dewantary, "Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia," https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/, diakses pada 2 November 2025.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi
Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)**
Patricia Abigail Simanjuntak, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 7149).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi
Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)
Patricia Abigail Simanjuntak, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832).

F. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn atas nama Terdakwa Maulana Akhyar Lubis.

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa I Laksamana Muda TNI Purnawirawan Agus Purwoto, Terdakwa II Arifin Wiguna, dan Terdakwa III Surya Cipta Witoelar.

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bn atas nama Terdakwa Teuku Syahrial.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Jaya Irani Wakan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Samuel F. Matutina.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2327 K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Priyantono Jarot Nugroho.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4749 K/PID.SUS/2022. atas nama Terdakwa Ibrahim Ruray.

G. Konvensi Internasional

United Nations Convention Against Corruption, Vienna, 2003.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Palermo, 2000.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi
Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)**
Patricia Abigail Simanjuntak, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

H. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Himawan Zailani selaku Jaksa dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui *zoom meeting* pada tanggal 17 Mei 2026 pukul 19.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Theodora Yuni Shah Putri selaku Dosen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui *zoom meeting* pada tanggal 30 Mei 2026 pukul 19.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Wisnu Kristiyanto selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Temanggung melalui *zoom meeting* pada tanggal 13 Mei 2026 pukul 14.00 WIB.

I. Lain-Lain

Diky Anandya dan Kurnia Ramdhana, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023 Indonesia Corruption Watch," Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2024.

Pemerintah Republik Indonesia, "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2025.

Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Tama S. Langkun et al., "Studi atas Disparitas Putusan-Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi," Indonesia Corruption Watch," Jakarta, 2014.

Tim Laporan Tahunan Komisi Pemberantas Korupsi, "Laporan Tahunan KPK 2025," Komisi Pemberantas Korupsi, Jakarta, 2025.

Tim Penyusun, "Indonesia's Money Laundering Risk Assessment On Corruption," Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2017.

Tim Penyusun Indonesia Risk Assesment on Money Laundering 2021, "Indonesia Risk Assessment on Money Laundering 2021," Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2021.

Zararah Azhim Syah, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024," Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2025.